

TESIS

**RELASI ANGGOTA DPRD FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
PERIODE 2014-2019 DI KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

Disusun dan diajukan oleh:

**FIKAR ADI SAMZUL
E052181010**



**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

TESIS

**RELASI ANGGOTA DPRD FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
PERIODE 2014-2019 DI KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

Disusun dan diajukan Oleh:

**FIKAR ADI SAMZUL
E052181010**

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

**RELASI ANGGOTA DPRD FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
PERIODE 2014-2019 DI KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

Disusun dan diajukan oleh

FIKAR ADI SAMZUL

E052181010

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Politik Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

pada tanggal **27 Januari 2022**

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si
Nip. 19710917 199703 1 001

Pembimbing Pendamping,



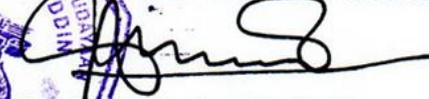
Dr. Ariana Yunus, S.IP., M.Si
Nip. 19710705 199803 2 002

Ketua Program Studi
Ilmu Politik,



Dr. Ariana Yunus, S.IP., M.Si
Nip. 19710705 199803 2 002

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. H. Armin, M.Si
Nip. 19651109 199103 1 008



PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fikar Adi Samzul
NIM : E052181010
Program Studi : (S2) Ilmu Politik Konsentrasi Politik Lokal

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri dan bukan merupakan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 24 Januari 2022

Yang menyatakan,



Fikar Adi Samzul
E052181010

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh

Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah swt, pemilik segala sesuatu yang kepadanya kita sebagai hambanya akan menghadapkan amal yang dilakukan selama berada didunia fana ini. Kasih dan sayang Allah swt untuk manusia sebagai makhluk yang paling istimewa diantara semua makhluk yang diciptakan semata-mata untuk menyembah dan bersujud kepadanya. Allah swt pula yang telah memberikan berbagai nikmat dan karunia sehingga kita dapat menjalani hidup seperti sekarang ini, maha suci Allah swt atas segala rahmatnya. Salam serta salawat tak lupa kita kirimkan kepada nabi Muhammad saw yang karena perjuangan dan pengorbanan beliau sehingga kita dapat merasakan zaman yang penuh dengan moral dan etika, beliau juga sebagai pahlawan yang revolusioner ditengah krisis kepemimpinan dimasa suram umat manusia pada zamannya. Semoga Allah swt meridhoinya dan merahmati segala perjuangan dan pengorbanan beliau untuk agama dan era yang cerah bagi umat manusia.

Penulis menyadari bahwa selesainya penulisan tesis ini adalah berkat dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa kepada Ayahanda **H. Suardi** dan Ibunda **H. Farida** tercinta yang telah memberikan cinta dan kasih sayangnya, perhatian dan motivasi dukungan serta doa yang tulus dalam keberhasilan penulisan sampai sekarang ini serta Keluarga besar penulis yang selalu memberikan motivasi selama kuliah sampai penyelesaian tesis ini dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
2. Ibu **Prof Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, MA.**, selaku rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat mengenyam pendidikan tinggi pada Program Strata - 2 (S2) Universitas Hasanuddin.
3. Bapak **Prof. Armin Arsyad, M.Si.**, selaku dekan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Hasanuddin.
4. Ibu **Dr. Ariana Yunus, S. IP., M. Si.**, selaku ketua magister ilmu politik pasca sarjana Universitas Hasanuddin.
5. Bapak **Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si** selaku dosen pembimbing I dan **Dr. Ariana Yunus, S. IP., M. Si.**, selaku dosen pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya dalam membimbing, mengarahkan dan memberikan ide kepada penulis, sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
6. Bapak **Drs. H. A. Yakub, Ph.D, Dr. Muhammad Saad, MA, Dr. A. Lukam Irwan, S.IP., M.Si.** sebagai Penguji dalam ujian

tesis yang telah banyak memberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun.

7. Segenap dosen, pegawai dan seluruh staf Program Studi Ilmu Politik Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin yang telah memberikan Ilmu pengetahuan dalam bidang politik, motivasi, nasihat, dan pelayanannya selama penulis dalam proses perkuliahan.
8. Kepada Abd. Rahman Makkatuo, Aco Dwi Setya, A. Ummu Kaltsum, Pratiwi Quenta Maharani, Tasria Lestari, Rahmi, Titi Syamsuri, Ros Pratiwi Asnur, Erlina Arief, Suriawati, Hajaruddin, Muhammad Mirza Ikhwan A, Muhlis Maulana Ibrahim, Irfan dan Ilham yang telah memberikan semangat, kebersamaan dan bantuannya kepada penulis selama menumpuh perkuliahan sampai penyelesaian tesis ini.
9. Kepada seluruh Informan yang telah membantu penulis dalam mencari dan mengumpulkan data yang dibutuhkan.

Penulis menyadari bahwa dalam tesis ini terdapat kekurangan. Oleh karena itu saran dan kritik konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan. Semoga segala dukungan dan bantuan semua pihak mendapatkan pahala dari Allah swt. semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Makassar, 18 Januari 2022

ABSTRAK

FIKAR ADI SAMZUL *Relasi Anggota DPRD Fraksi Partai Demokrat Periode 2014 - 2019 di Kabupaten Parigi Moutong (dibimbing oleh Muhammad dan Ariana Yunus).*

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis relasi kuasa dalam pengambilan keputusan fraksi Partai Demokrat Periode 2014 - 2019 DPRD Kabupaten Parigi Moutong; mengetahui relasi antaranggota dalam fraksi Partai Demokrat periode 2014 - 2019 DPRD Kab. Parigi Moutong terhadap pengambilan keputusan; dan aktor yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan dalam fraksi Partai Demokrat.

Jenis penelitian bersifat kualitatif. Teori yang digunakan adalah (1) teori relasi kuasa, (2) teori strukturasi Giddens (3) konsep pengambilan keputusan, dan (4) konsep fraksi dan mekanisme kerja fraksi. Pengumpulan data primer menggunakan metode wawancara, sedangkan data sekunder menggunakan metode dokumenter dan kajian pustaka. Data dianalisis secara diskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik yang terjadi dalam internal Partai Demokrat tersebut berdampak pada relasi fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Parigi Moutong. Bapak Haris Lasimpura sebagai ketua fraksi Partai Demokrat mulai tidak mengindahkan aturan-aturan partai yang berlaku. Komunikasi dalam fraksi tidak terbangun sehingga anggota fraksi lainnya tidak mengetahui agenda yang harus dilakukan untuk memenuhi tuntutan-tuntutan masyarakat, khususnya tuntutan konstituen Partai Demokrat. Hal tersebut menyebabkan penyaluran aspirasi rakyat sedikit terhambat, terutama konstituen Partai Demokrat yang ada di daerah pemilihan masing-masing anggota fraksi. Selain itu, pascapemilihan kepala daerah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2018 bupati yang terpilih bukan lagi usungan dari Partai Demokrat sehingga dalam menyalurkan beberapa aspirasi, khususnya di daerah konstituen partai Demokrat tidak terlalu diakomodasi oleh bupati terpilih.

Kata kunci: relasi anggota, aktor fraksi DPRD partai Demokrat



ABSTRACT

FIKAR ADI SAMZUL. *Relations between DPRD Members from The Democratic Party Faction for The 2014-2019 Period in Parigi Moutong Regency* (Supervised by **Muhammad and Ariana Yunus**)

This study aims to determine and analyze power relations in the decision making of the Democratic Party Faction for the 2014-2019 period DPRD Parigi Moutong Regency, knowing the relationship between members in the Democratic Party faction for the 2014-2019 period DPRD Parigi Moutong Regency on decision making and to find out the actors who influence decision making in the Democratic party faction.

The type of research used was qualitative research. The theories used in this thesis were (1) Power Relation Theory; (2) Giddens Structural Theory; (3) Decision Making Concept; and (4) Fraction Concept and Fraction Working Mechanism. The primary data collection method in this thesis used the interview method, while the secondary data used the documentary method and the literature review method. The data analysis method used was descriptive analysis of the results of interviews.

The results of the study that the internal conflicts that occur within the Democratic party has an impact on the relations of the relations of the factions in the Parigi Moutong Regency DPRD. Mr. Haris Lasimpara as chairman pf the Democratic party faction begins to ignore the prevailing party rules. Communication within the faction is not developed so that other faction members do not know the agenda that has to be carried out to meet the demands of the community, especially the demands of the Democratic party constituents. So that in channeling the aspirations of the people, it is slightly hampered, especially for the constituents of the Democratic party in the electoral districts of each member of the faction. In addition, after the 2018 Parigi Moutong district head election, the elected regent is no longer a stretcher from the Democratic party. So that in channeling some aspirations, especially in the constituency areas of the Democratic party, the elected regents are not too accommodated.

Keywords: Member Relations, Actor, Democratic Party DPRD Faction



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDULi
HALAMAN PENGESAHANii
PERNYATAAN KEASLIAAN TESIS.....iii
KATA PENGANTARiv
ABSTRAK.....vii
ABSTRACTviii
DAFTAR ISIix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang1
1.2 Rumusan Masalah11
1.3 Tujuan Penelitian11
1.4 Manfaat Penelitian12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Teori Relasi Kuasa.....13
2.2 Teori Strukturasi Giddens.....18
2.3 Konsep Pengambilan Keputusan23
2.4 Konsep Fraksi dan Mekanisme Kerja Fraksi26
2.5 Penelitian yang Relevan30
2.6 Kerangka Pemikiran37
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan Penelitian39
3.2 Lokasi Penelitian40
3.3 Teknik Penentuan Informan41
3.4 Jenis dan Sumber Data42
3.5 Teknik Pengumpulan Data43
3.6 Teknik Analisis Data45

BAB IV GAMBARAN UMUM47
4.1 Kabupaten Parigi Moutong47
4.2 Profil Partai Demokrat kabupaten Parigi Moutong52
4.3 Pengertian Fraksi54
BAB V PEMBAHASAN58
5.1 Relasi kuasa dalam pengambilan keputusan Fraksi Partai Demokrat Periode 2014-2019 DPRD Kab. Parigi Moutong.....	.. 58
5.2 Relasi antar anggota dalam fraksi Partai Demokrat periode 2014 2019 DPRD Kab. Parigi Moutong terhadap pengambilan keputusan.....	..70
5.3. Implikasi Teori79
BAB VI PENUTUP85
6.1 Kesimpulan.....	..85
6.2 Saran.....	..87
DAFTAR PUSTAKA.....	..89
LAMPIRAN.....	..92

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di beberapa negara termasuk Indonesia, demokrasi dijadikan sebagai alternatif dalam menata aktivitas bermasyarakat dan bernegara. Secara etimologis demokrasi terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu *demos* yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan *cratein* atau *cratos* yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Secara bahasa *demos-cratein* atau *demos-cratos* adalah sistem pemerintahan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan oleh rakyat. Doktrin *power of the people*, kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat merupakan fondasi dasar dari demokrasi. Bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam sistem pemerintahan.¹

Menurut Joseph A. Schmeter, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.² Demokrasi dianggap sebagai ruang pengambilan keputusan yang paling kolektif dan paling kuat melalui musyawarah, *voting* atau pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala.

¹ Haedar Nashir, *Pragmatisme Politik Kaum Elite*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hal. 37.

² Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani* (Jakarta: ICCE UIN Jakarta, 2000), hal. 100.

Dalam sistem demokrasi para calon secara bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan suara. Sistem ini dalam pandangan Robert Dahl mengandung dua dimensi yaitu dimensi konteks dan dimensi partisipasi dan dua dimensi ini merupakan hal yang paling menentukan bagi demokrasi dan politik.³

Demokrasi sebagai sistem pemerintahan di Indonesia telah lama dipilih sebagai alternatif dalam menata masyarakat. Sejak zaman kemerdekaan sampai saat ini, Indonesia telah menjadi negara demokrasi. Namun dalam perjalanan sejarah Indonesia, perwujudan demokrasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pada pemerintahan presiden Soekarno menerapkan sistem pemerintahan konsep demokrasi terpimpin. Konsep demokrasi barat yang bersifat liberal tidak dapat menciptakan kestabilan politik.

Orde baru menampilkan pemerintahan demokratis tetapi hanya berlangsung selama 3 tahun yakni selama pemerintah baru menyiapkan format politik melalui penyusunan Undang-Undang bidang politik. Setelah pelaksanaan pemilu 1971, orde baru menjalankan pemerintahan yang otoriter. Karakteristik otoriter negara berlangsung hingga dijatuhkannya rezim orde baru oleh gerakan reformasi pada juli 1998.⁴ Sejak turunnya Soeharto, era reformasi dimulai. Demokrasi menemukan kembali bentuknya sebagai sistem pemerintahan. Pada era reformasi sistem

³ Samuel P.Huntington, *Gelombang Demokrasi Ketiga*, (Jakarta: Garfity, 1995), hal.5.

⁴ Mahfud MD, *Amandemen Konstitusi menuju Reformasi Tata Negara*, (Yogyakarta: UII, 1999), hal. 65.

kepartaian di Indonesia menganut sistem multi partai. Sekalipun sistem multi partai dijalankan kembali pada masa era reformasi, pada dasarnya sistem multi partai telah dilaksanakan sejak era kemerdekaan.

Sebelum tahun 2004, pemilihan umum di Indonesia hanya untuk memilih wakil rakyat di DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota. Tradisi politik ini berlangsung sejak pemilu tahun 1955. Sepanjang pemilu yang diselenggarakan oleh orde baru hingga 1999, rakyat tidak pernah mendapat kesempatan untuk memilih langsung calon kepala negara. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Komisi Pemilihan Umum (KPU) berhasil menyelenggarakan pilpres langsung pada pertengahan tahun 2004. Pemilihan Presiden pada pemilu 2004 diselenggarakan sebanyak dua putaran.

Pemilihan presiden tahun 2004 memenangkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK). Pasangan nomor urut 4 tersebut menang telak dengan perolehan suara 60,62%. Kemenangan pasangan SBY dan JK ini mengantarkan Demokrat sebagai partai penguasa. Pada pemilu 2009 terjadi perubahan dan pergeseran signifikan dalam perolehan suara partai politik. Apabila pada pemilu 2004 Golkar menjadi pemenang pemilu maka pada pemilu 2009 Partai Demokrat memenangkan pemilu dengan perolehan suara sebanyak 20,85% mengalahkan partai-partai dominan sebelumnya. Faktor kemenangan Demokrat pada pemilu 2009 tidak terlepas dari pengaruh SBY. SBY

selama menjadi presiden menjadi figur tunggal Partai Demokrat. SBY dan Demokrat dianggap oleh masyarakat sebagai satu kesatuan tidak bisa dipisahkan.

Kampanye-kampanye dan iklan-iklan Demokrat kerap menumpang pada kepopuleran SBY. Istilah politik pencitraan benar-benar berhasil dimanfaatkan oleh para caleg Demokrat. Selain itu, kebijakan-kebijakan populis di tahun-tahun terakhir kekuasaan SBY mendorong popularitas SBY dan Demokrat. Kebijakan tiga kali menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM), kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kebijakan PNBM, Raskin dan Sekolah Gratis membuat sebagian masyarakat senang dan Bahagia terutama pada *grass root*. Politik pencitraan dan kebijakan populis menghasilkan kemenangan Partai Demokrat dan Susilo Bambang Yudhoyono berpasangan dengan Boediono pada pemilu legislatif dan pilpres tahun 2009. SBY dan Boediono memperoleh suara 60,80% suara pada putaran pertama pemilihan presiden tahun 2009.

Sebagai pemenang pemilu legislatif dan pemilu presiden 2009, Demokrat menjadi partai yang diidolakan oleh tokoh-tokoh politik lokal hingga struktur Partai Demokrat terbentuk ke berbagai kabupaten/kota termasuk ke Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Berdasarkan penelusuran oleh peneliti, pada tanggal 7 Mei 2002 Partai Demokrat resmi terbentuk di Kabupaten Parigi Moutong. Abdul Haris Lasimpara ditunjuk menjadi Ketua DPC Partai Demokrat pertama di Kabupaten Parigi Moutong. Di pemilu tahun 2004, Abdul Haris Lasimpara untuk pertama

kalinya mencalonkan diri sebagai calon legislatif dalam pemilihan legislatif di kabupaten Parigi Moutong. Pada pemilihan legislatif tersebut, Abdul Haris Lasimpara berhasil mendapatkan suara terbanyak dan juga meloloskan satu kader lainnya dari partai Demokrat yaitu Gede Sudewo. Kedua kader fraksi partai Demokrat tersebut bergabung dengan beberapa partai lainya untuk membentuk fraksi gabungan karena dalam aturan pembentukan fraksi di parlemen, partai Demokrat tidak memenuhi syarat untuk membentuk fraksi sendiri. Gabungan fraksi tersebut di namakan fraksi Tororanga. Keberhasilan partai Demokrat di tingkat nasional dalam pemilihan umum 2004, menjadikan bapak Susilo Bambang Yudhiyono sebagai presiden Republik Indonesia ke 6.

Pada tahun 2009, dominasi partai Demokrat dalam pemilu semakin besar dengan terpilihnya kembali bapak Susilo Bambang Yudhiyono sebagai presiden Republik Indonesia untuk periode keduanya. Tren positif partai Demokrat di tingkat nasional juga dirasakan kader-kadernya di tingkat lokal. Di kabupaten Parigi Moutong, partai Demokrat berhasil mengantarkan lima calon legislatifnya masuk di dalam parlemen kabupaten Parigi Moutong dan sudah membentuk fraksi sendiri yaitu fraksi partai Demokrat. Keberhasilan partai Demokrat memperoleh 5 kursi membuat Abdul Haris Lasimpara di periode keduanya menduduki kursi wakil ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di kabupaten Parigi Moutong. Adapun Anggota legislatif terpilih yang berasal dari partai

Demokrat Parigi Moutong adalah Abdul Haris Lasimpara, H. Suardi, Adiyana Janji, Imam Muslimin dan Made Sudarsana.

Di pemilihan umum 2014, partai Demokrat tetap mendapatkan 5 kursi yang mengantarkan kembali Abdul Haris Lasimpara sebagai wakil ketua DPRD dan tetap membentuk fraksi sendiri dalam parlemen. Calon legislatif yang terpilih pada periode 2014 masih sama seperti periode sebelumnya yaitu Abdul Haris Lasimpara, H. Suardi, Adiyana Janji, Imam Muslimin dan Made Sudarsana.

Terpilih sebagai anggota DPRD kabupaten Parigi Moutong selama 3 periode, Abdul Haris Lasimpara berinisiatif untuk mencalonkan diri sebagai calon bupati di pemilihan kepala daerah kabupaten Parigi Moutong tahun 2018. Merasa matang dan banyak pengalaman di bidang pemerintahan khususnya di lembaga legialatif, beliau memberanikan diri untuk maju dalam pemilihan kepala daerah tersebut dan memilih partai Demokrat sebagai partai pengusung. Dalam proses mencari koalisi partai pengusung, Abdul Haris Lasimpara mendapatkan kendala dari internal partai Demokrat dengan munculnya Amrullah Ahmadali yang juga ingin mencalonkan sebagai calon bupati kabupaten Parigi Moutong.

Amrullah Ahmadali adalah anggota DPRD provinsi Sulawesi Tengah dari partai Demokrat dan juga merupakan salah satu kader terbaik partai. Jalan terjal yang di lalui Abdul Haris Lasimpara saat mencari rekomendasi dari partai Demokrat. Dua kader terbaik yang sama-sama

ingin mencalonkan diri sebagai calon bupati tentunya tidak mudah untuk mendapatkan rekomendasi tersebut. Konflik internal pun terjadi di partai Demokrat Parigi Moutong dalam menentukan calon yang ingin di usung dan diberikan rekomendasi untuk maju sebagai calon bupati. Setelah kekisruhan yang terjadi di dalam internal partai Demokrat, menghasilkan Amrullah Ahmadi mendapatkan rekomendasi untuk maju sebagai bakal calon bupati kabupaten Parigi Moutong sedangkan Abdul Haris Lasimpara gagal maju sebagai bakal calon bupati.

Kekisruhan yang terjadi tidak cukup sampai disitu, posisi Abdul Haris Lasimpara sebagai ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) partai Demokrat kabupaten Parigi Moutong selama tiga periode juga di lengserkan dan digantikan oleh PLT Nur Dg Rahmatu. Kegaduan kepengurusan partai Demokrat seusai di tinggal oleh Abdul Haris Lasimpara berdampak pada fraksi dan kader-kader yang masih menjabat di DPRD. Mereka bagaikan “anak ayam yang ditinggal induknya” yang tidak memiliki arah untuk pertarungan politik selanjutnya di pemilu tahun 2019. Kegaduan yang terjadi dalam internal partai, membuat arah politik tidak terarah dengan baik.

Pemilihan legislatif tahun 2019 awal dari ke hancuran partai Demokrat di kabupaten Parigi Moutong. Di masa penjaringan caleg untuk memenuhi kuota partai Demokrat tidak melalui proses mekanisme yang ada. PLT ketua DPC partai Demokrat menunjuk langsung caleg-caleg untuk memenuhi kuota per dapil. Yang lebih fatalnya PLT ketua DPC

memilih pendatang baru untuk mengisi kuota per dapil partai Demokrat dan tidak memperhitungkan basis suara caleg yang dipilih sebelum menempatkannya di dapil tersebut. Caleg dari dapil 1 dipindahkan ke dapil 5, sehingga caleg yang dipilih tidak memiliki basis suara di dapil tersebut. Begitupula dengan caleg dapil 3 yang dipindahkan ke dapil 2. Strategi politik yang dilakukan tersebut membuat caleg partai Demokrat tidak lagi mendapatkan 5 kursi.

Melihat kekisruhan yang masih terjadi di dalam internal partai Demokrat, Abdul Haris Lasimpara lebih memilih untuk maju di DPRD Provinsi sedangkan empat lainnya tetap bertahan di DPRD kabupaten Parigi Moutong. Perengkingan suara individu caleg partai Demokrat yang pernah menjabat di periode sebelumnya cukup besar. Bahkan perolehan suaranya diatas caleg-caleg dari partai lain yang mendapatkan kursi. Tetapi untuk perolehan suara partai, partai Demokrat ketinggalan jauh dari partai-partai lainnya sehingga hanya mendapatkan 2 kursi dari semua dapil.

Berdasarkan putusan KPU Parigi Moutong nomor: 406/PL.01.9-Kpt/7207/KPU-Kab/VIII/2019, Partai PKB memperoleh empat kursi dari lima daerah pemilihan, dibanding Pemilu 2014 partai tersebut hanya memperoleh tiga kursi. Sedangkan Partai Gerindra meraih lima kursi. Kemudian Partai PDIP dan HANURA meraih empat kursi, justru Golkar mengalami kemunduran yang sebelumnya lima kursi kini hanya mampu meraih tiga kursi. Sementara Partai NasDem yang pada Pemilu

sebelumnya hanya meraih tiga kursi, di Pemilu 2019 Partai besutan Surya Paloh itu melejit dengan perolehan empat kursi serta sekaligus partai pemenang Pemilu di Parigi Moutong. Partai Berkarya sebagai pendatang baru di Pemilu tahun ini, justru mampu mendulang satu kursi, demikian Partai Perindo yang sama sebagai pendatang baru meraih tiga kursi di DPRD Parigi Moutong. PKS dan PAN sama-sama meraih tiga kursi demikian Partai Demokrat dan PBB masing-masing meraih dua kursi, PPP satu kursi.⁵ Kemunduran perolehan jumlah kursi partai Demokrat dalam pemilihan legislatif tahun 2019 sebabkan oleh caleg-caleg pendatang baru dari partai Demokrat tidak mendapatkan suara yang signifikan untuk masuk 10 besar perengkingan partai dalam penentuan jumlah kursi.

Pemilihan legislatif tahun 2019 minyiskan satu caleg *Incumbent* dari fraksi partai Demokrat yaitu H Suardi dan memunculkan caleg baru yang bernama Rusno AHT. Kehancuran fraksi partai Demokrat di pemilihan legislatif 2019 disebabkan oleh PLT DPC partai Demokrat yang tidak optimal mengurus partai dan lebih memilih caleg-caleg pendatang baru untuk di tempatkan di suatu dapil.

Dengan mlihat kekisruhan yang terjadi diatas, tentunya berdampak pada fraksi Demokrat yang berada di DPRD. Tugas dan fungsi fraksi tentunya akan terganggu dengan adanya masalah tersebut. Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD

⁵ <https://pemilu.antaranews.com/berita/1004104/kpu-parigi-moutong-tetapkan-40-kursi-parpol-pemenang-pemilu>

Kabupaten serta hak dan kewajiban anggota DPRD Kabupaten sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka DPRD Kabupaten diwajibkan membentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD Kabupaten. Fraksi bertugas mengkoordinasikan kegiatan anggotanya demi mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi kerja anggota dewan yang berada dalam fraksi yang bersangkutan. Pada periode 2014-2019 di DPRD Kabupaten Parigi Moutong terbentuk fraksi partai Demokrat.

Konflik yang terjadi sebelum pemilihan bupati tahun 2018 tersebut berdampak pada relasi anggota DPRD di fraksi Partai Demokrat. Pasca pemilihan Bupati kabupaten Parigi Muotong, Abdul Haris Lasimpara mulai mengambil keputusan sendiri dalam fraksi dan tidak mendengarkan keempat anggota lainnya. Selain itu, Abdul Haris Lasimpara juga tidak lagi mengurus partai Demokrat menjelang pemilihan legislatif tahun 2019. Hal tersebut berdampak pada proses penjurangan caleg yang tidak optimal dan dilakukan dua minggu sebelum penutupan pendaftaran caleg.

Sebagai wadah untuk mengoptimalkan fungsi, tugas dan wewenang anggota DPRD Kab. Parigi Moutong yang berasal dari partai Demokrat tentu saja terjadi persaingan kuasa satu sama lain seperti yang terjadi dipenjelasan sebelumnya. Dalam pandangan Foucault kekuasaan ada dimana-mana, kekuasaan merupakan satu dimensi dari relasi. Fraksi partai Demokrat sebagai lembaga tentu saja memiliki aturan, struktur dan susunan-susunan dalam prakteknya. Untuk menguraikan relasi kuasa

yang terbangun di fraksi partai Demokrat, dalam penelitian ini penulis menelusuri Relasi Anggota DPRD di Fraksi Partai Demokrat Periode 2014-2019 Di Kabupaten Parigi Moutong.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, peneliti membatasi permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana relasi kuasa dalam pengambilan keputusan Fraksi Partai Demokrat Periode 2014-2019 DPRD Kab. Parigi Moutong?
2. Bagaimana relasi antar anggota dalam fraksi Partai Demokrat periode 2014-2019 DPRD Kab. Parigi Moutong terhadap pengambilan keputusan?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui relasi kuasa dalam pengambilan keputusan Fraksi Partai Demokrat Periode 2014-2019 DPRD Kab. Parigi Moutong?
2. Untuk mengetahui relasi antar anggota dalam fraksi Partai Demokrat periode 2014-2019 DPRD Kab. Parigi Moutong terhadap pengambilan keputusan.
3. Untuk mengetahui aktor yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan dalam fraksi partai Demokrat.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik dan Akademis

Kegunaan teoritis dalam penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep-konsep, teori-teori terhadap relasi kuasa di dalam partai politik khususnya pada fraksi-fraksi partai politik di parlemen.

2. Manfaat Praktis

Kegunaan praktis dalam penelitian dapat ini digunakan sebagai rujukan dalam melihat bentuk-bentuk relasi yang dikonstruksi oleh legislator dalam pengambilan kebijakan dan bagaimana relasi-relasi dapat menjadikan aktor politik berpengaruh dan berkuasa dalam setiap proses pengambilan keputusan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai beberapa teori dan konsep yang dijadikan dasar terkait pada masalah penelitian yaitu:

2.1. Teori Relasi Kuasa

Secara umum, defnisi kekuasaan menurut Foucault dibagi menjadi dua macam, yaitu defnisi negatif dan defnisi positif. Dalam defnisi negatif disebutkan bahwa kuasa bukanlah melalui kekerasan atau hasil suatu persetujuan seperti yang diungkapkan Hobbes, Locke atau Rousseau. Bukan melalui represi seperti yang sampaikan oleh Freud dan Reich. Bukan pula hasil dari pertarungan kekuatan seperti yang digambarkan Machiavelli.⁶

Kekuasaan bukan fungsi dominasi suatu kelas yang didasarkan pada penguasaan atas ekonomi atau manipulasi ideologi seperti Marx. Dan kekuasaan bukan juga dimiliki berkat suatu kharisma seperti yang diungkapkan Weber. Namun, dalam defnisi positif kekuasaan bahwa kekuasaan merupakan seluruh struktur tindakan yang menekan dan mendorong tindakan-tindakan lain melalui persuasi, rangsangan, rayuan, paksaan dan larangan.

Kekuasaan bukanlah institusi, bukan struktur, bukan pula kekuatan yang dimiliki, tapi nama yang diberikan pada situasi strategis kompleks dalam masyarakat. Lebih lanjut, kekuasaan itu beragam, tersebar seperti

⁶ Martua Pahalaning Wandalibrata. 2019. Kajian Metafisika “Relasi Kuasa” Dalam Pemikiran Michel Foucault. *JURNAL CAKRAWARTI*, Vol. 02 No. 0. Hlm. 66

jaringan dan produktif, dimana kekuasaan lahir dari perbedaan dan ketidaksamaan.⁷

Pemikiran Foucault tentang kontrol penciptaan diskursus dan bekerjanya kekuasaan (power) pada pengetahuan sangat membantu para teoritis dan praktisi perubahan sosial untuk melakukan pembongkaran terhadap teori dan praktek pembangunan. Hal ini perlu diperhatikan karena tanpa menganalisis pembangunan sebagai suatu diskursus, maka akan sulit untuk memahami bagaimana.

Sumbangan terbesar Foucault terhadap teori dan praktek perubahan sosial adalah membuat teori ini lebih sensitif terhadap relasi kekuasaan dan dominasi dan menyadarkan kita bagaimana relasi kekuasaan (power) teranyam disetiap aspek kehidupan serta kehidupan pribadi, dan ini bertentangan dengan umumnya kenyataan ilmu sosial yang cenderung mengabaikan “kekuasaan” dalam dunia ilmu pengetahuan, dan asumsi bahwa pengetahuan itu netral, obyektif dan tak berdosa. Kecenderungan memandang bahwa kekuasaan hanya terpusat di negara ataupun kelas, bagi Foucault merupakan pengingkaran kenyataan, karena relasi kekuasaan terdapat pada setiap aspek kehidupan. Konsep tentang kekuasaan (power) ini memberikan pengaruh besar tentang bagaimana aspek dan pusat lokasi dari kekuasaan serta bentuk perjuangan untuk membatasi dan bagaimana berbagai kekuasaan.

⁷ Martua Pahalaning Wandalibrata. 2019. Kajian Metafisika “Relasi Kuasa” Dalam Pemikiran Michel Foucault. *JURNAL CAKRAWARTI*, Vol. 02 No. 01. Hlm. 66

Jika umumnya kekuasaan hanya tertuju pada negara dan kelas elit, pemikiran Foucault membuka kemungkinan untuk membongkar semua dominasi dan relasi kekuasaan, seperti kekuasaan dalam pengetahuan antara para pencipta diskursus, birokrat, akademisi, dan rakyat miskin jelata yang “tidak beradab” yang harus disiplinkan, diregulasi dan “dibina”.⁸

Bagi Foucault kekuasaan itu produktif dan tidak bisa dipisahkan dari pengetahuan. Sasaran kekuasaan adalah tubuh dan tujuannya adalah kepatuhan untuk bisa produktif. Kekuasaan memberikan struktur dan kegiatan dalam masyarakat. Keseluruhan struktur hukum, politik, aturan sosial dan pengetahuan melanggengkan dominasi dan menjamin reproduksi kepatuhan. Orang hanya bisa mengambil bagian atau menderita kekuasaan lewat jaringan atau gugus kekuasaan. Kekuasaan dilaksanakan melalui manajemen energi, kemampuan dan kehidupan masyarakat dimana pengetahuan menjadi landasannya. Yang menjadi poin penting dari setiap karya Foucault adalah mengenai kekuasaan dan pengetahuan. Pengetahuan melahirkan kekuasaan, kekuasaan melahirkan pengetahuan. Pengetahuan terlembaga dan menjadi otoritas kekuasaan yang menentukan ini yang benar dan itu yang salah.

Dalam pandangan Michel Foucault, kekuasaan merupakan satu dimensi dari relasi. Dimana ada relasi, di sana ada kekuasaan.⁹ Kekuasaan berada di mana-mana. Kehendak untuk kekuasaan sama

⁸ Martua Pahalaning Wandalibrata. 2019. Kajian Metafisika “Relasi Kuasa” Dalam Pemikiran Michel Foucault. *JURNAL CAKRAWARTI*, Vol. 02 No. 01. Hlm. 66

⁹ Muji Sutrisno & Hendar Purtanto, *Teori-Teori Kebudayaan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2005), hal. 146.

dengan kehendak untuk kebenaran. Pada dasarnya kekuasaan tidak hanya terletak pada pimpinan dalam institusi atau masyarakat melainkan tersebar ke berbagai relasi. Kekuasaan dalam pandangan Foucault tidak hanya dimiliki dan dipraktekkan dalam suatu ruang lingkup dimana ada banyak posisi secara strategis berkaitan antara satu dengan yang lain. Foucault memahami kekuasaan secara lebih orisinal.¹⁰ Foucault meneliti kekuasaan lebih pada individu sebagai subjek dalam lingkup yang lebih kecil.¹¹

Namun yang perlu diperhatikan di sini bahwa pengertian tentang Kekuasaan menurut Foucault sama sekali berbeda dengan pengertian yang dipahami oleh masyarakat selama ini. Pada umumnya, kekuasaan dipahami dan dibicarakan sebagai daya atau pengaruh yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga untuk memaksakan kehendaknya kepada pihak lain. Dalam konteks ini kekuasaan diartikan secara represif dan kadangkala malah opresif. Yakni adanya dominasi antara subjek dan objek kekuasaan. Semisal kekuasaan Negara pada masyarakat, raja pada rakyatnya, suami pada isteri, pemilik modal kepada para karyawannya. Pengertian semacam itu banyak digunakan oleh para ahli sejarah, politik dan sosial. Kekuasaan tersebut beroperasi secara tak sadar dalam jaringan kesadaran masyarakat. Karena kekuasaan tidak datang dari luar tapi menentukan susunan, aturan-aturan, hubungan-hubungan itu dari dalam.

¹⁰ Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial Perspektif Klasik, Modern, Postmodern dan Postkolonial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada) hal. 81.

¹¹ Muji Sutrisno, *op.cit*, hal. 150

Sebagai contoh dapat disebutkan bahwa hubungan keluarga yang menormalkan bahwa suami adalah yang harus bekerja untuk mencari nafkah sementara isteri hanya bertugas mengurus rumah tangga serta merawat anak-anaknya. Atau contoh lain misalnya tentang karyawan yang secara berdisiplin bekerja sesuai dengan tugas-tugasnya. Bahwa ketaatan karyawan tersebut bukan karena adanya represi dari bos atau pimpinan namun karena adanya regulasi-regulasi dari dalam yang menormalkan. Mereka bekerja dengan giat bukan saja hanya karena ada ancaman atau tekanan tapi juga karena adanya semacam struktur diskursif yang mengatakan akan ada penghargaan bagi karyawan yang berprestasi dalam bekerja.

Kekuasaan menurut Foucault tidak selalu bekerja melalui represi dan intimidasi melainkan pertama-tama bekerja melalui aturan-aturan dan normalisasi.¹² Kekuasaan selalu hadir dalam aturan-aturan, sistem-sistem regulasi dan dimana saja manusia juga memiliki hubungan tertentu. Di ruang-ruang seperti itulah kekuasaan bekerja. Kekuasaan berasal dari dalam, kekuasaan menentukan susunan, aturan-aturan dan hubungan dari dalam.¹³ Dengan adanya normalisasi atau pendisiplinan diri, bentuk *subjection* (penyerahan diri kepada seseorang) seperti seorang pasien kepada psikiater. Tujuan dari adanya mekanisme kekuasaan ialah membentuk setiap individu untuk memiliki dedikasi dan disiplin diri agar

¹² Konrad Kebung, *Michael Foucault Parrhesia dan Persoalan Mengenai Etika*, (Jakarta: Obor, 1997), hal. 121.

¹³ Nurisma Yunitamurti, "Wacana TKW dalam Novel "Aku Bukan Budak" dan "Dari Tanah Haram ke Ranah Minang", *Skripsi*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2004), hal. 25

menjadi pribadi yang produktif.¹⁴ Segala hukum dan aturan diarahkan untuk mencapai tujuan. Namun bagi Foucault, kekuasaan bukan suatu yang absolut, melainkan diperebutkan terus menerus dalam sebuah relasi. *Where there is power, there is resistance.*¹⁵ Dalam penelitian ini kita akan menggunakan teori relasi kuasa Michael Foucault untuk menganalisa bentuk-bentuk relasi kuasa di dalam Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Parigi Moutong periode 2014-2019. Teori relasi kuasa Foucault akan berusaha menguraikan bagaimana relasi-relasi yang ada dalam Fraksi Partai Demokrat membentuk kuasa di antara anggota DPRD pada periode 2014-2019.

2.2. Teori Strukturasi Giddens

Anthony Giddens melakukan kritik terhadap teori fungsionalisme dan evolusionisme dalam teori strukturalisme. Teori strukturasi Giddens secara lebih luas sangat menarik dan dapat digunakan sebagai alat analisa yang tajam terutama mengenai relasi antara agen (aktor) dan struktur (sistem) dalam kehidupan masyarakat sebagai fakta sosial yang objektif. Inti dari teori strukturasi Giddens terletak pada tiga konsep utama yaitu “struktur”, “sistem” dan “dualitas struktur”.¹⁶ Lebih khusus lagi dalam hubungannya antara agen (pelaku, aktor) dan struktur. Setiap penelitian ilmu sosial atau sejarah pasti melibatkan pengaitan tindakan (seringkali digunakan secara sinonim dengan *agensis*) dengan struktur dan tidak

¹⁴ Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, (Jakarta: Penerbit Kompas, 2003), hal. 22.

¹⁵ Nurisma Yunitamurti, *op.cit*, hal. 28.

¹⁶ Anthony Giddens, *Teori Strukturasi: Dasar-Dasar Pembentukan Struktur Sosial Manusia*, Terjemahan Maufur & Daryanto, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 25.

mungkin struktur menentukan tindakan atau sebaliknya. Giddens dengan teori strukturasinya menekankan kajian pada praktik sosial yang tengah berlangsung sebagaimana dinyatakan bahwa ranah dasar studi ilmu-ilmu sosial, menurut teori strukturasi, bukanlah pengalaman aktor individu ataupun eksistensi bentuk totalitas sosial apapun, melainkan praktik yang ditata di sepanjang ruang dan waktu.¹⁷

Strukturasi memandang pentingnya praktik sosial baik dalam aksi maupun dalam struktur kehidupan masyarakat. Strukturasi mengacu pada suatu cara dimana struktur sosial (*social structure*) diproduksi, direproduksi dan diubah di dalam dan melalui praktik. Pengertian strukturasi dikaitkan dengan konsep dualitas struktur dimana struktur-struktur yang diproduksi dan direproduksi baik oleh tindakan-tindakan manusia maupun melalui medium tindakan sosial. Teori strukturasi Giddens mencakup tentang kemampuan intelektual aktor-aktor, dimensi spasial dan temporal tindakan, keterbukaan dan kemungkinan tindakan dalam kehidupan sehari-hari, dan kekeliruan pemisahan antara agen dan struktur (*agency and structure*) dalam masyarakat. Giddens berusaha melampaui batas-batas fungsionalisme dan kegigihannya dalam mentransformasikan dikotomi antara agen dan struktur telah diterima dalam sosiologi.

Salah satu pijakan teori strukturasi adalah pandangan tentang struktur. Namun konsep atau pandangan Giddens tentang struktur

¹⁷ Goerge Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir*, Terjemahan Nurhadi, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008), hal. 568.

berbeda dengan pandangan strukturalisme atau post strukturalisme, meskipun hingga batas tertentu konsep Giddens tentang struktur tidak mudah dipahami dan mengundang kritik. Dalam pandangan Giddens struktur itu sebagai “*rules and resources*” yakni tata aturan dan sumber daya,¹⁸ yang selalu diproduksi dan direproduksi, serta memiliki dualitas agensi dan melahirkan berbagai praktik sosial sebagaimana tindakan sosial. Strukturalisme struktur dipandang sebagai suatu penciptaan pola relasi-relasi sosial atau fenomena-fenomena sosial serupa, sebagai kerangka atau morfologi sebuah organisme atau tiang penyangga sebuah bangunan, yang berada di luar tindakan manusia.

Kritik Giddens terhadap strukturalisme ialah bahwa pandangan strukturalisme fungsional cenderung lebih tertuju pada fungsi dari struktur dan meletakkan struktur sebagai sesuatu yang berada di luar.¹⁹ Bagi Giddens struktur merujuk pada aturan-aturan dan sarana-sarana atau sumber daya yang memiliki perlengkapan-perlengkapan struktural yang memungkinkan pengikat ruang dan waktu yang mereproduksi praktik-praktik sosial dalam sistem-sistem sosial kehidupan masyarakat. Dalam pandangan Giddens, struktur merupakan aturan atau sumber daya atau seperangkat relasi transformasi, terorganisasi sebagai kelengkapan-kelengkapan dari sistem sosial, dan sistem merupakan relasi-relasi yang direproduksi di antara para aktor atau kolektivitas, terorganisasi sebagai praktik sosial regular serta strukturasi merupakan kondisi-kondisi yang

¹⁸ Anthony Giddens, *op.cit*, hal. 3

¹⁹ Anthony Giddens, *op.cit*, hal. 25-26

mengatur keterulangan atau transformasi struktur-struktur dan karenanya reproduksi sistem-sistem sosial itu sendiri.²⁰

Dengan kelengkapan-kelengkapan struktural tersebut, suatu struktur memungkinkan keberadaan praktik-praktik sosial bersifat sistemik. Karena itu, Giddens memaknai struktur sebagai perangkat aturan dan sumber daya yang terorganisasikan secara rutin, berada di luar ruang dan waktu, tersimpan dalam koordinasi dan instansiasinya dalam bentuk jejak-jejak ingatan, dan ditandai dengan ketidakhadiran subjek. Sedangkan sistem sosial secara rutin melibatkan struktur terdiri dari aktivitas-aktivitas tertentu para agen manusia dan direproduksi sepanjang ruang dan waktu.

Giddens konsisten melihat struktur dalam kehidupan masyarakat sebagai sesuatu yang tidak terlepas dari tindakan manusia yang berada di dalamnya, begitu pula sebaliknya. Giddens mengamati dan menyimpulkan bahwa lingkungan sosial dimana manusia berada tidak hanya terdiri dari aneka peristiwa atau tindakan yang kebetulan, namun merupakan sesuatu yang terstruktur. Ada keteraturan yang mendasari dalam cara orang berperilaku dan dalam hubungan dimana mereka berdiri satu sama lain. Untuk tingkat tertentu akan sangat membantu untuk membayangkan karakteristik struktural dari masyarakat sebagai menyerupai struktur dari masyarakat sebagai menyerupai struktur bangunan. Sebuah bangunan memiliki dinding, lantai dan atap, yang bersama-sama memberikan bentuk tertentu atas format bangunan tersebut. Sistem sosial terdiri dari tindakan

²⁰ Anthony Giddens, *op.cit*, hal. 40

manusia dan berbagai hubungan tentang apa yang memberi pola dan bagaimana perulangannya di seluruh periode waktu dan jarak ruang.

Dengan demikian ide-ide reproduksi dan struktur sosial itu sangat erat terkait satu sama lain dalam analisis sosiologis. Kita harus memahami masyarakat atau sebuah komunitas menjadi seperti bangunan yang setiap saat sedang direkonstruksi oleh susunan batu bata yang membentuk bangunan tersebut. Tindakan individu dipengaruhi oleh karakteristik struktural dari masyarakat dimana individu yang bersangkutan dibesarkan dan hidup, pada saat yang sama manusia menciptakan (dan juga sampai batas tertentu mengubah) karakteristik struktural dalam tindakan mereka.

Giddens melihat relasi antara struktur dan pelaku terletak dalam proses dimana struktur sosial merupakan hasil (*outcome*) dan sekaligus sarana (*medium*) praktik sosial. Dalam konsep strukturasi Giddens memberikan pilihan paradigmatis baru bahwa tidak mesti struktural atau sebaliknya subjektual yang dominan dalam praktik kehidupan sosial manusia atau dalam interaksi sebuah komunitas. Interaksi dalam sebuah komunitas dapat dilihat dalam berbagai praktik sosial yang saling timbal-balik atau dualitas antara struktur dan pelaku (*agensis*) dalam fakta sosial yang objektif. Sekalipun dalam kehidupan masyarakat dan interaksi dalam sebuah komunitas tidak selalu harmonis seperti yang dibayangkan oleh Giddens, sebab tidak jarang terjadi dominasi struktur terhadap aktor atau sebaliknya, sehingga dualisme relasi struktur dan agensi bersifat sangat dinamis.

Oleh karena itu untuk mendapatkan hasil penelitian yang mendalam penulis menggunakan teori strukturasi Giddens untuk mengamati, menganalisa dan menyimpulkan relasi antara struktur (*structure*) dan agen (*actor*) dalam seluruh aktivitas atau pelaksanaan fungsi dan kedudukan anggota DPRD yang tergabung dalam Fraksi Partai Demokrat di DPRD Kabupaten Parigi Moutong pada periode 2014-2019. Teori strukturasi Giddens akan mencoba memperlihatkan bagaimana relasi-relasi antara aktor dan struktur dibentuk dalam konteks ruang dan waktu. Sehingga akan memperlihatkan konsep dualitas di antara para anggota DPRD.

2.3. Konsep Pengambilan Keputusan

Kajian ilmu politik yang menjadikan kebijakan sebagai bidang kajiannya berasumsi bahwa setiap orang, masyarakat ataupun negara mempunyai tujuan bersama dan untuk melaksanakan tujuan tersebut dibutuhkan suatu aturan yang mengikat. Aturan tersebut dibuat dalam bentuk kebijakan-kebijakan.

Dalam konteks pengambilan keputusan, pendapat Mirriam Budiardjo (1992:11) yang mengatakan bahwa keputusan (*decision*) adalah membuat pilihan di antara beberapa alternatif, sejalan dengan Joys Micthel "*collective decision making or the making of public policies for entire society*". Pendapat ini sama juga dengan pendapat Karl W. Deutsch dalam bukunya *Politics and Government, How people decide their Fate* menyatakan: "*Politics is the making of decisions by publics*

means". Dengan demikian, maka yang konsep kebijakan dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dibuat oleh seseorang atau sekelompok orang dalam menentukan tujuan, serta sarana dan metode yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang dimaksud dengan sarana adalah fasilitas serta alat yang dapat digunakan, sedangkan metode adalah cara-cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Beberapa contoh yang termasuk dalam kebijakan negara, antara lain memelihara ketertiban umum, memajukan perkembangan masyarakat dalam berbagai hal, mengorganisir berbagai aktivitas dan menyelenggarakan kesejahteraan rakyat. Untuk lebih memahaminya di bawah ini disajikan beberapa pernyataan para ahli ilmu politik yang menjadikan kebijakan sebagai kajian ilmu politik, seperti dikutip A. Hoogerwerf (1985:46) dalam bukunya Politikologi, antara lain:

- a. Kehidupan politik menurut pendirian yang lazim, meliputi semua aktifitas yang berpengaruh terhadap kebijakan yang diterima baik bagi suatu masyarakat dan terhadap cara pelaksanaan kebijakn tersebut. (David Easton)
- b. Politik adalah aspek dari semua perbuatan yang berkenaan dengan usaha kolektif bagi tujuan-tujuan (Talcott Parson 1966:71-72)
- c. Yang diartikan dengan proses politik adalah sustu proses pembentukan kebijakan, pelaksanaan kebijakan atau

pembentukan kekuasaan dalam suatu sistem politik baik yang terorganisir maupun tidak. (G. Kuypers 1973:164).

Pengambilan keputusan adalah suatu proses menentukan pilihan berdasarkan alternatif-alternatif yang disusun. Kajian ilmu politik yang menempatkan pengambilan keputusan sebagai obyek studinya berpendapat bahwa pengambilan keputusan merupakan pusat dari proses politik, hal ini terutama didasarkan suatu kenyataan bahwa suatu kebijakan adalah sebagai pengejawantahan kekuasaan merupakan hasil dari pengambilan keputusan.

Adapun proses pengambilan keputusan itu sendiri dilakukan melalui beberapa tahapan.

1. Tahap pertama, mengetahui atau mempelajari persoalan-persoalan yang perlu diambil keputusannya.
2. Tahap kedua, merumuskan persoalan/masalah dengan jelas.
3. Tahap ketiga, membuat daftar tujuan yang mungkin dicapai berdasarkan urutan kebutuhan-kebutuhan yang lebih penting.
4. Tahap keempat adalah mengetahui semua sarana yang mungkin dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang disusun serta merencanakan biaya yang dibutuhkan untuk tiap alternatif yang diharapkan akan dapat mencapai tujuan.

5. Tahap kelima adalah membuat seleksi tentang tujuan mana yang akan dicapai dengan biaya seminimal mungkin dan hasil yang semaksimal mungkin.

Richard C. Snyder (1985:19) dalam bukunya *Approach to the Study of Politics* mengungkapkan konsepsi/pengertian tentang pengambilan keputusan: *Decision-making* diperoleh dari alternatif-alternatif urutan tindakan yang di seleksi dari sejumlah masalah yang terbatas yang ditetapkan secara sosial. Hal ini dapat dilihat dari tahapan-tahapan dalam proses pengambilan keputusan seperti diuraikan di atas.

2.4. Konsep Fraksi dan Mekanisme Kerja Fraksi

Dalam menselaraskan kepentingan Anggota Dewan yang beragam, perlu dibentuk fraksi atau kelompok Anggota DPR yang memiliki pandangan politik yang sejalan. Dengan adanya fraksi memungkinkan Anggota Dewan untuk dapat menjalankan tugas dan wewenangnya secara maksimal. Setiap Anggota Dewan wajib menjadi anggota salah satu fraksi. Fraksi bertugas mengkoordinasikan kegiatan anggotanya demi mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi kerja Anggota Dewan. Fraksi juga bertanggungjawab untuk mengevaluasi kinerja anggotanya dan melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada publik.

Pembentukan fraksi-fraksi DPRD bertujuan untuk mengoptimalkan sistem kerja Anggota DPRD yang terakumulasi dalam program kerja. Fraksi bukan bagian atau alat kelengkapan dewan. Fraksi merupakan

pengelompokan Anggota DPRD yang terdiri atas kekuatan sosial politik sebagai bentuk representatif masyarakat. Oleh karena itu, jumlah fraksi-fraksi dan Anggota Fraksi dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disesuaikan dengan perolehan kursi hasil pemilihan umum legislatif. Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568); maka ditemukan beberapa poin penting terkait eksistensi fraksi-fraksi.

Pasal 34

1. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, wewenang dan tugas DPRD, hak DPRD serta hak dan kewajiban Anggota DPRD, dibentuk Fraksi sebagai wadah berhimpun Anggota DPRD.
2. Setiap Anggota DPRD wajib menjadi anggota salah satu Fraksi.
3. Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah Komisi di DPRD.
4. Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1(satu) fraksi.
5. Dalam hal partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) anggotanya dapat bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk fraksi gabungan.

6. Dalam hal tidak ada 1 (satu) partai politik yang memenuhi persyaratan untuk membentuk fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka dibentuk fraksi gabungan yang jumlahnya paling banyak 2 (dua) fraksi gabungan.
7. Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus mendudukkan anggotanya dalam satu fraksi.
8. Pembentukan fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dilaporkan kepada pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna DPRD.
9. Fraksi yang telah diumumkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat tetap selama masa keanggotaan DPRD.

Pasal 35

1. Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 mempunyai sekretariat fraksi.
2. Sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas fraksi.
3. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan sarana dan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

Pasal 36

1. Setiap fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dibantu oleh tenaga ahli sesuai kebutuhan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
2. Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. Berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
 - b. Menguasai bidang pemerintahan; dan
 - c. Menguasai tugas dan fungsi DPRD.

Pasal 37

1. Dalam hal jumlah anggota Fraksi lebih dari 3 (tiga) orang, Pimpinan Fraksi terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
2. Dalam hal jumlah anggota Fraksi hanya 3 (tiga) orang, Pimpinan Fraksi terdiri atas Ketua dan Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.

3. Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat Paripurna.

Bertitik tolak pada esensi undang-undang , digagas beberapa tugas urgen fraksi yakni:

1. Menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan masing-masing.
2. Meningkatkan kualitas, kemampuan, efisiensi dan efektivitas kerja para Anggota Fraksi.
3. Melaksanakan kegiatan penyaringan dan penetapan pasangan bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta menyampaikannya kepada Pimpinan DPRD untuk dibawa ke Rapat Paripurna.
4. Pimpinan fraksi bersama pimpinan DPRD menetapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) pasang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) pasang Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan dipilih dalam Rapat Paripurna DPRD yang diambil dari usulan fraksi-fraksi.

2.5. Penelitian yang Relevan

Penelitian sebelumnya yang relevan adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan ide baru untuk penelitian selanjutnya. Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang akan dilakukan

dan membuat menjadi ringkasan, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum dipublikasi (Skripsi, tesis dan jurnal). Berikut karya ilmiah yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian penulis antara lain:

2.5.1. Anin Khoirunnisa (2015) Relasi Kekuasaan di Kalangan Calon Anggota Legislatif dalam Pemilihan Umum Legislatif DPRD Kota Surabaya Periode 2014-2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada Pemilu legislatif DPRD Surabaya dari tahun 2009 hingga 2014 telah menunjukkan bahwa partai politik memenuhi kuota caleg perempuan sekurang-kurangnya 30%. Namun, tidak semua partai politik mencerminkan keterwakilan perempuan sebesar 30%. Walaupun kemudian dalam persebaran struktur / jabatan DPRD Kota Surabaya, para anggota DPRD perempuan masih ditempatkan dalam posisi subordinat. Relasi kekuasaan caleg perempuan dalam upaya pemenangan pemilu legislatif beragam. Relasi kekuasaan caleg perempuan dengan parpol, pengurus parpol, caleg laki-laki saat pendaftaran dan penentuan nomor urut tidak menguntungkan, tetapi dengan tim sukses saling menguntungkan. Relasi kekuasaan saat penentuan dapil dan kampanye politik dengan parpol dan lembaga penyelenggara pemilu tidak menguntungkan. sedangkan saling menguntungkan dengan partai politik, antar caleg perempuan, tim sukses, konstituen. Saat pemungutan suara, relasi

kekuasaan dengan saksi tidak menguntungkan dan saling menguntungkan. Sedangkan dengan caleg lakilaki, parpol, dan lembaga penyelenggara pemilu tidak menguntungkan, serta dengan antar caleg perempuan dan tim sukses saling menguntungkan.²¹

2.5.2. Agus Sudarmansyah (2013) Peran Fraksi Dalam Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hasil penelitian ini menemukan bahwa salah satu ekspektasi pemilih adalah tersalurkannya aspirasi mereka melalui anggota legislatif yang mereka pilih (DPRD), dengan mekanisme penjaringan dan penyaluran aspirasi, hal ini dapat dilakukan lewat mekanisme reses, waktu khusus yang diperuntukkan bagi anggota DPRD, dan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) pada tataran birokrasi pemerintah, juga harus diimbangi dengan mekanisme yang dikembangkan di dalam partai politik dalam menyerap aspirasi konstituennya. Fungsi menyerap, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi konstituen partai politik oleh anggota legislative merupakan salah satu yang harus dijalankan sesuai dengan program kerja partai politik. Realitas politik yang berkembang saat ini mengisyaratkan kandidat terpilih (anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan) harus menyerap aspirasi dengan memanfaatkan waktu reses dan

²¹ Anin Khoirunnisa, "Relasi Kekuasaan di Kalangan Calon Legislatif dalam Pemilihan Umum Legislatif DPRD Kota Surabaya Periode 2014-2019", *Jurnal*, Departemen Sosiologi, Universitas Airlangga, 2015, hal. v.

saat-saat melakukan kunjungan kerja ke daerah pemilihan (dapil). Anggota DPRD telah melakukan komunikasi politik dengan masyarakat meskipun komunikasi yang dilakukan tidaklah seperti yang diinginkan, dalam pelaksanaan komunikasi anggota DPRD dengan konstituen, banyak sekali masukan-masukan dari masyarakat yang dapat di jadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan, sehingga kebijakan yang di buat tepat sasaran dan tepat guna. Ada beberapa permasalahan yang di hadapi dalam melakukan komunikasi politik diantaranya berkenaan dengan masalah waktu diadakannya komunikasi politik dengan masyarakat, partisipasi masyarakat, dana yang terbatas dalam merealisasikan pembangunan, sehingga berdampak bagi anggota DPRD dalam komunikasi politik yang dianggap tidak aspiratif. Anggota DPRD harus selalu melakukan komunikasi yang efektif dengan konstituennya, karena tanpa komunikasi yang efektif antara konstituen dengan anggota DPRD, maka akan terjadi kemacetan dalam sistem politik lokal yang mengakibatkan aspirasi dan kepentingan konstituen tidak terwujud. Kata Kunci : Peran, Anggota DPRD, Aspirasi Konstituen.²²

²² Adityawarman, "Peran Fraksi Dalam Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah", *Jurnal*, Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh Ciamis, 2019, hal. 1.

2.5.3. Irwan Sardi (2017) Relasi Kuasa dan Modal: Studi Perlawanan Masyarakat Desa Nangka terhadap Pembukaan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Gemilang Cahaya Mentari. Hasil penelitian menunjukkan, hubungan yang terjadi antara penguasa dan pengusaha lebih didasarkan pada logika instrumentalis dengan adanya praktik relasi yang tidak seimbang dalam penentuan kebijakan dan wacana pembukaan perkebunan kelapa sawit. Praktik itu terwujud dalam hasil keputusan yang merugikan masyarakat dengan adanya negosiasi dan manipulasi terstruktur, yang akhirnya hanya menguntungkan pihak aparatur desa dan bawahannya. Keadaan itu dilakukan oleh aparatur desa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan memiliki wewenang dalam membuat keputusan. Ternyata kekuasaan yang dimilikinya telah menerapkan kekuasaan yang otoriter dalam upaya untuk memperkaya dirinya sendiri dan golongannya. Terlebih lagi tanpa adanya partisipasi masyarakat untuk dilibatkan dalam mengambil kebijakan itu, akhirnya membuat masyarakat berupaya untuk melawan bentuk kekuasaan tersebut. Perlawanan dilakukan tidak lain adalah untuk membongkar dominasi dan pola kuasa yang dijalankan aparatur desa dengan cara melakukan penyatuan melalui pembentukan forum peduli lingkungan Desa Nangka, sebagai wadah untuk membongkar

praktik kuasa dan tempat masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya secara legal.²³

2.5.4. Agus Sudarmansyah (2013) Peran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Fraksi PDI Perjuangan dalam Menyalurkan Aspirasi Konstituen di Kabupaten Kubu Raya

Realitas politik yang berkembang saat ini mengisyaratkan kandidat terpilih (anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan) harus menyerap aspirasi dengan memanfaatkan waktu reses dan saat-saat melakukan kunjungan kerja ke daerah pemilihan (dapil). Anggota DPRD telah melakukan komunikasi politik dengan masyarakat meskipun komunikasi yang dilakukan tidaklah seperti yang diinginkan, dalam pelaksanaan komunikasi anggota DPRD dengan konstituen, banyak sekali masukan-masukan dari masyarakat yang dapat di jadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan, sehingga kebijakan yang di buat tepat sasaran dan tepat guna. Anggota DPRD harus selalu melakukan komunikasi yang efektif dengan konstituennya, karena tanpa komunikasi yang efektif antara konstituen dengan anggota DPRD, maka akan terjadi

²³ Irwan Sardi, "Relasi Kuasa dan Modal: Studi Perlawanan Masyarakat Desa Nangka terhadap Pembukaan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Gemilang Cahaya Mentari", *Jurnal Analisa Sosiologi*, Program Studi Magister Sosiologi Universitas Sebelas Maret, 2017, hal. 38.

kemacetan dalam sistem politik lokal yang mengakibatkan aspirasi dan kepentingan konstituen tidak terwujud.²⁴

2.5.5. Muhtar Haboddin (2016) Relasi Parlemen Dengan Konstituen. Secara konseptual relasi parlemen dengan konstituen bisa dilakukan dengan anekaragam bentuk dan polanya. Namun demikian, pada tataran prakteknya ternyata tidak bisa dilakukan oleh parlemen. Hal ini menunjukkan terjadinya gap antara teori dan praktek. Bahkan, dalam kasus di Indonesia pola relasi yang terbangun antara parlemen dengan konstituen masih sebatas formalitas. Padahal yang paling dibutuhkan dalam pola relasi ini adalah terjadinya kolaborasi, berjejaring, dan berkerjasama yang pada akhirnya membentuk pola relasi yang substansial. Maksudnya, anggota parlemen akan selalu berjuang dan bekerja berdasarkan tuntutan, keinginan, dan kepentingan politik konstituennya. Pola inilah yang sejatinya hadir dalam panggung politik Indonesia.²⁵

Dari lima studi pustaka diatas, dilakukan perbandingan menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan dengan kajian penelitian penulis. Persamaan terlihat pada topik penelitian yaitu relasi kekuasaan yang terjadi di DPRD dan konflik yang terjadi di fraksi. Adapun perbedaan

²⁴ Agus Sudarmansyah, "Peran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Fraksi PDI Perjuangan dalam Menyalurkan Aspirasi Konstituen di Kabupaten Kubu Raya", *Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIP*, Program Studi Ilmu Politik Magister Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak, 2013, hal. 1.

²⁵ Muhtar Haboddin, "Relasi Parlemen Dengan Konstituen", *Jurnal Transformatif*, Program Studi di Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya, 2016, hal. 16.

pada ruang lingkup kajian dan hasil penelitian yang dicapai peneliti terdahulu mengkaji tentang relasi anggota legislatif terhadap eksternal partai dalam parlemen. Sedangkan penelitian ini lebih melihat bagaimana relasi kekuasaan yang terjadi di internal partai demokrat kabupaten Parigi Moutong. Selain itu, peneliti juga ingin melihat bagaimana konflik yang terjadi di dalam fraksi partai Demokrat DPRD kabupaten Parigi Moutong.

2.6. Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir ini disusun sebagai landasan penelitian yaitu untuk menguji teori mengenai relasi anggota DPRD di fraksi partai Demokrat periode 2014-2019 di kabupaten Parigi Moutong dan konflik internal yang terjadi di dalam partai demokrat. Konflik yang terjadi mempengaruhi relasi anggota DPRD di fraksi partai Demokrat. Penelitian ini berangkat dari konflik internal partai Demokrat kemudian berdampak pada relasi fraksi partai Demokrat di DPRD Kabupaten Parigi Moutong. Dari hubungan relasi tersebut, terdapat aktor yang berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan baik dalam fraksi partai demokrat maupun dalam internal partai demokrat menjelang pemilihan legislatif tahun 2019 di kabupaten Parigi Moutong. Berdasarkan uraian diatas, penulis menyusun kerangka pemikiran penelitian ini sebagai berikut :

Skema Pikir

